



Kerjasama Multipihak Tangani Bencana Banjir di Jakarta

Palmerah, Warta Kota

Sekretaris Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat menilai bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Bahkan bencana mampu mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan.

"Bencana dapat dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam meliputi gempa bumi,

tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Sedangkan bencana non-alam mencakup kecelakaan industri, kebakaran, dan pencemaran," sebut Marulitua, Senin (30/12/2024).

Marulitua menjelaskan bencana sosial berhubungan dengan konflik sosial dan terorisme, sementara bencana alam berkaitan dengan fenomena hidrologi dan meteorologi atau lebih dikenal dengan sebutan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, pohon tumbang, tanah longsor dan

kekeringan.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027, bencana banjir masuk dalam prioritas pertama upaya pengurangan risiko bencana.

Ketika musim hujan, curah hujan di Jakarta dapat mencapai kategori ekstrem seperti yang terjadi tahun 2020 yakni mencapai 377 mm per hari.

"Kondisi curah hujan yang tinggi dan adanya aliran air di 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way serta kondisi utara Jakarta yang didominasi di bawah permukaan air laut, membuat Jakarta rentan terhadap bencana banjir," jelasnya.

Marulitua, yang sempat menjadi narasumber simulasi penanggulangan bencana di wilayah Jabodetabek 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menuturkan, berdasarkan data BPBD Jakarta, pada periode Januari hingga November 2024 telah terjadi 808 Kejadian Bencana Hidrometeorologi, berupa 109 kejadian banjir, 317 kejadian jalan tergenang, 13 kejadian angin kencang, 333 kejadian pohon tumbang dan 36 kejadian tanah longsor.

Sementara potensi banjir di Jakarta disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

1. Luapan sungai

Melampainya sungai yang melintasi wilayah Jakarta bila hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama di hulu sungai. Pemukiman penduduk di aliran sungai Cihwang akan terdampak banjir bila debit air melebihi ambang yakni 600 m³/dik.

2. Hujan lokal

Hujan dengan curah yang tinggi dan durasi yang lama akan menyebabkan air tidak tertampung dan teralirkan,

karena kapasitas saluran yang secara umum dapat mengalirkan curah hujan maksimal 100 mm/hari.

3. Banjir rob

Terjadi manakala air laut pasang di wilayah pesisir Jakarta dan terjadi penurunan muka tanah (land subsidence).

Terkait penanganan bencana banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya antisipatif dan bekerjasama dengan pemerintah pusat hingga daerah lain, kalangan akademisi, pihak swasta, masyarakat, dan peran media.

Kerjasama multipihak sejalan dengan upaya pemerintah provinsi dalam penanganan bencana, yakni menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Keslapan Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi bencana banjir dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya:

1. Peningkatan infrastruktur: revitalisasi saluran air, pengerukan sungai dan penyiapan rumah pompa air di titik-titik rawan banjir.
2. Peningkatan Kesiapsiagaan, berupa penyiapan buffer stock logistik dan peralatan penyelamatan seperti perahu karet dan pelampung, optimalisasi fungsi pompa air, pengerukan kali/sungai/waduk/embung dan saluran, penopangan pohon.
3. Sosialisasi dan edukasi, yang melibatkan warga dalam simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat di kawasan rawan banjir.
4. Melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang bekerjasama dengan BMKG, BNPB untuk menurunkan intensitas curah hujan di wilayah Jakarta melalui

penyemaian awan.

Pemprov Jakarta juga sudah menyiapkan layanan pengaduan dan darurat masyarakat melalui Jakarta Siaga 112 secara gratis. Layanan ini beroperasi 24 jam non stop.

Marulitua menyampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait mengantisipasi bencana banjir telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BNPB guna melakukan modifikasi cuaca yang bertujuan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya.

...kait dengan potensi curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta menjadi dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pada tahap pertama (7-9 Desember 2024), pelaksanaan OMC berhasil mengurangi intensitas hujan sebesar 67 persen, sementara pada tahap kedua (13-16 Desember 2024) mengurangi intensitas hujan sebesar 69 persen dengan upaya modifikasi cuaca yang dilakukan ini diharapkan bila pun terjadi hujan di lokal Jakarta maka daya tampung saluran masih mumpuni," ucapnya.

Kerjasama multipihak juga dijalin dengan TNI, Polri, Pramuka, PMI dan komunitas relawan dan lembaga relawan. Peran media dan perguruan tinggi pun menjadi penting dalam kerjasama multipihak guna penanggulangan banjir di Jakarta mengingat kemampuan media dalam memberikan informasi yang cepat dan tepat serta kemampuan akademisi dalam melakukan kajian dan penelitian guna mendapatkan solusi jitu penanggulangan banjir di Jakarta. (m37)